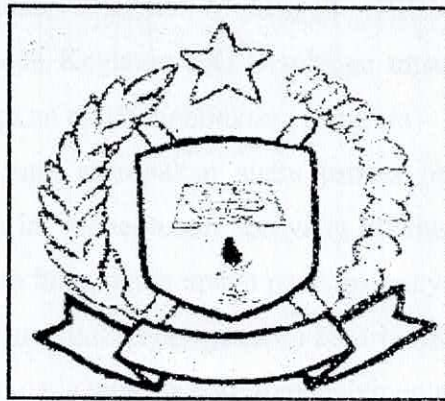


PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT



***RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2014 – 2019***

**DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

b. Amanat Regulasi tentang perlunya penyusunan Renstra SKPD

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA – SKPD yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-SKPD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Dan sebagaimana yang ditegaskan didalam Peraturan Pemerintah Tahun 2008 (PP Nomor 8/2008) bahwa setiap SKPD diarahkan (diharuskan) untuk menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan yang tercantum pada Bab IV, Pasal 25). Renstra SKPD dapat disebut juga sebagai dokumen perencanaan taktis-strategis.

c. Nilai Strategis Renstra SKPD

Keberadaan Renstra SKPD akan sangat membantu Kepala Daerah dalam menjabarkan visi, misi, dan program-program pembangunan yang telah dikampanyekan pada saat Pilkada yang lalu dan telah dimuat didalam RPJM Daerah. Dokumen Renstra SKPD juga akan memudahkan Kepala Daerah dalam mengevaluasi capaian kinerja program dan proyek/kegiatan, serta mengetahui sejauhmana penanganan dan penanggulangan terhadap berbagai masalah dan kondisi kekinian yang ada di tengah-tengah masyarakat selama ke pemerintahannya telah dilakukan oleh SKPD yang diberikan tugas pelayanan untuk itu.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program yang dilaksanakan, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat harus terus menerus melakukan perubahan menuju perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang lebih baik.

Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum perlu membuat suatu perencanaan yang dinamakan Rencana Strategis (Renstra). Renstra ini merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh SKPD untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Jasa Konstruksi,
- Undang undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya air,
- Undang undang Nomor 7 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi kabupaten – kabupaten dalam lingkungan provinsi Sumatera Utara,
- Undang undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1982 tentang perpindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan,tata cara penyusunan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Langkat,
- Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat Tahun 2014 – 2019.
- Peraturan Bupati Langkat Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Langkat.

3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra SKPD.

- a. Maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat adalah untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan penyampaian pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum untuk kurun waktu 5(Lima) Tahun kedepan dalam prinsip – prinsip penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance).
- b. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum adalah :
 - merumuskan gambaran kondisi pelayanan yang dilaksanakan untuk diberikan kepada masyarakat, yang menyangkut pembangunan dan pengembangan sarana maupun fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan Infrastruktur di Kabupaten Langkat untuk 5(Lima) Tahun kedepan.
 - Merumuskan gambaran ketersediaan Anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan Kegiatan selama 5(Lima) tahun kedepan.
 - Untuk menerjemahkan Visi dan misi Kepala Daerah kedalam tujuan dan Sasaran pembangunan Daerah selama 5(Lima) tahun sesuai dengan Tupoksi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode Tahun berkenaan,
 - Untuk menetapkan berbagai Program dan Kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

4. Sistematika penulisan.

- Bab I : Pendahuluan yang mencakup Latar belakang, Landasan Hukum dan maksud /tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II : Gambaran Pelayanan SKPD yang mencakup tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD,Sumber daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD.
- Bab III : Isu isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi mencakup identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi,misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan renstra Provinsi, Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata ruang wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis, serta penentuan isu isu strategis.
- Bab IV : Visi,misi,Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan mencakup Visi dan misi SKPD, Tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD , strategi dan kebijakan.
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif.
- Bab VI : Indikator Kinerja SKPD yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD.
- Bab VII : Penutup.

3. Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

3.1. Tanah.

Tanah milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat adalah seluas 30.084,50 M2 yang merupakan tanah persil bersertifikat Tahun 1993 yang terletak di Jl.T.Amir Hamzah No.3 Stabat.

3.2. Bangunan Kantor

Bangunan gedung kantor seluas 4.116 M2 terdiri atas :

- Bangunan kantor	:	722	M2
- Bangunan Laboratorium	:	112.50	M2
- Bangunan KM/WC	:	21	M2
- Bangunan garasi alat berat	:	1.224	M2
- Bangunan bengkel/workshop	:	630	M2
- Bangunan Musholla	:	81	M2
- Bangunan gedung parkir	:	128	M2
- Bangunan Aula	:	240	M2
- Bangunan Pos jaga	:	34,50	M2
- Bangunan gedung arsip (tertutup)	:	25	M2
- Bangunan gudang (tertutup)	:	760	M2
- Bangunan Workshop (terbuka)	:	138	M2

4.3 Peralatan & Mesin

Dalam pelaksanaan Tugas pokok dan Fungsi, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat didukung dengan beberapa peralatan dan perlengkapan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Alat – alat besar seperti Motor Grader, Buldozer, Exavator, Wheel Loader, dll.
- Alat – alat angkutan seperti Mini Bus, Pick up, Speda motor dll.
- Alat – alat bengkel.
- Alat – alat Kantor dan Rumah Tangga seperti Komputer, Note book, Mesin tik, Printer, Lemari, Meja kerja, Kursi dll.
- Alat – alat studio berupa Kamera, GPS, proyektor, Teodolite, Alat ukur dll
- Alat – alat Laboratorium berupa Pelobang aspal, CBR, Sand cone test, Mesin core drill, Extraksi dll

4. Kinerja pelayanan SKPD, tantangan dan peluang Pengembangan pelayanan SKPD.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber jaringan, sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Langkat telah menjadi prioritas utama Pemerintah, mengingat bahwa sarana dan prasarana fisik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang paling krusial dan menyentuh kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dari sisi Pemerintah sendiri alokasi dana dan sumber dana lainnya yang diperuntukkan bagi perkembangan sarana dan prasarana fisik semakin mendapat perhatian dan memperlihatkan peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya.

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik baik bangunan, jaringan jalan/jembatan dan pengairan merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam mengatasi permasalahan pembangunan di Kabupaten Langkat.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam perbaikan dan penyempurnaan kinerja saat ini mengoptimalkan fungsi – fungsi pelayanan kepada masyarakat yang bersifat stimulan dan berkelanjutan. Pada akhir tahun 2013 (awal Tahun 2014) kondisi Sarana jalan dan Pengairan dapat dilihat sebagai berikut :

- Jumlah luasan sawah beririgasi 2.759 Ha.
- Prosen luas irigasi dalam keadaan baik 42,46 %
- Prosentase panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi baik 65,75 %
- Panjang jalan desa yang tertangani 154,26 Km.

Dan berdasarkan hasil Penyusunan Data base Jalan dan Jembatan Tahun 2013 Panjang jaringan Jalan yang ada di Kabupaten Langkat adalah sepanjang 1.412,84 Km dan Jembatan sebanyak 84 Buah yang terdiri atas :

NO	Type Permukaan	Satuan	Panjang jalan
1	Jalan Aspal	Km	809.83
2	Jalan Kerikil	Km	595.81
3	Jalan batu	Km	119,20
3	Jalan Tanah	Km	88.30
	JUMLAH		1,412.84

NO	Jembatan	Satuan	Panjang jalan
1	Jembatan	Bh	83
2	Jembatan sementara	Bh	1
	JUMLAH		84

Dari data panjang jalan diatas dapat diuraikan dengan kondisi sebagai berikut :

NO	Kondisi Permukaan jalan	Satuan	Panjang
1	Baik	Km	245,83
2	Sedang	Km	319,30
3	Rusak	Km	807,30
3	Rusak berat	Km	40,41
JUMLAH			1,412.84

NO	Kondisi Jembatan	Satuan	Panjang
1	Baik	M	798
2	Sedang	M	498
3	Rusak	M	422
JUMLAH			1,718

Hasil penyusunan Data base Pengairan maka dapat diuraikan Data – data berupa

1. Sungai : sepanjang : 903 Km,
2. Saluran Daerah irigasi : seluas : 4.728 Ha

Dengan memandang dari tugas dan fungsi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat berupaya meningkatkan pelayanan dalam mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik yang merata, dan melakukan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan pembangunan demi pelayanan kepada masyarakat dibidang infrastruktur.

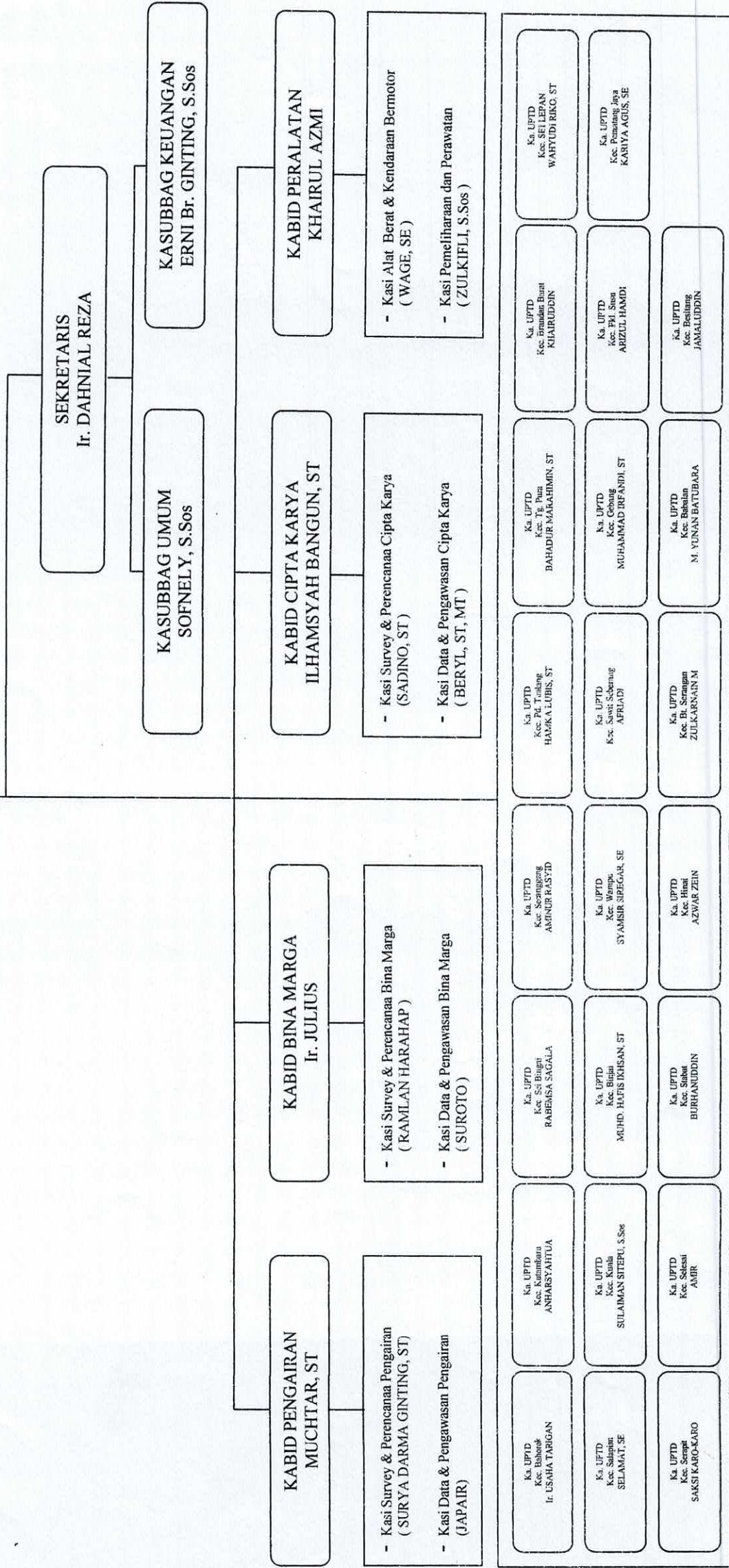
Dalam usaha untuk mewujudkan kualitas dan kuantitas demi pelayanan kepada masyarakat tersebut terdapat beberapa tantangan yang sering dihadapi Dinas Pekerjaan umum diantaranya adalah :

- Alokasi Dana pembangunan yang ada masih belum memadai untuk melaksanakan pembangunan secara tuntas dan cepat.
- Penanganan jalan Kabupaten belum mendapatkan prioritas, sehingga jalan Kabupaten dalam Kondisi baik masih kurang dari emmadai.
- Alokasi anggaran pembangunan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan program, tapi masih berorientasi pada pemerataan Kecamatan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta menjaga dan merawat aset – aset pembangunan prasarana fisik seperti jalan/jembatan dan Pengairan.

Atas kendala – kendala yang dihadapi, maka Dinas Pekerjaan umum berupaya meningkatkan/mengupayakan alokasi dana untuk prioritas pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat sehingga pelaksanaan pembangunan dapat menyentuh kepentingan rakyat dengan perencanaan yang jelas dan terarah.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LANGKAT**

**KEPALA DINAS
Ir. BAMBANG IRAWADI**



**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**



BAB – III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

1. **Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD.**

Bidang Pekerjaan Umum terdiri dari pembangunan jaringan jalan, jembatan dan saluran drainase; baik pengembangan sistem jaringan maupun pemeliharaan/perawatan. Ketiga komponen dalam bidang ini merupakan prasarana dasar pengembangan kawasan dibidang ke PU an.

Permasalahan prasarana jalan, jembatan serta jaringan dan irigasi di Kabupaten Langkat saat ini di antaranya adalah :

- (1) Berat kendaraan pengangkut barang cukup tinggi, sehingga jalan menjadi rusak maka untuk keamanan lalu lintas jalan perlu diperlebar.
- (2) Banyak sarana air bersih (sumur bor) tidak terawat karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk merawatnya dengan baik sehingga mengakibatkan bangunan sumur bor banyak yang tidak berfungsi lagi. Dalam hal masalah ini perlu kiranya dibentuk Lembaga swadaya masyarakat oleh Desa untuk menjaga kesinambungan fungsi dari pembangunan sumur bor tersebut.
- (3) Adanya permasalahan pembebasan lahan untuk pembangunan bendung di Kec. Sei lepan termasuk jaringan/trase saluran irigasi primer dan saluran skunder menuju ke areal persawahan potensial. sehingga diharapkan Tim pembebasan lahan dari Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat dapat segera merealisasikan pembebasan lahan dimaksud.
- (4) Kondisi jaringan jalan dan jembatan masih perlu ditingkatkan penanganan dan perawatannya. peningkatan jaringan jalan dan jembatan telah dilakukan secara bertahap, yang disesuaikan dengan kemampuan alokasi anggaran.
- (5) Pembangunan jalan relatif masih terbatas, disebabkan alokasi anggaran yang tersedia masih rendah.
- (6) Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menjaga dan merawat hasil-hasil pembangunan jalan dan jembatan. Kerusakan jalan sering disebabkan aktivitas-aktivitas masyarakat yang melakukan pengangkutan material bahan bangunan seperti Galian “C” yang melebihi kapasitas daya dukung konstruksi jalan, timbunan bahan bangunan di badan atau di pinggir jalan yang menyebabkan terhalangnya aliran air ke drainase saat hujan, dan lain-lain.
- (7) Terdapat permasalahan prasarana jaringan drainase sehingga terjadi banjir ataupun genangan air.
- (8) Keterbatasan kemampuan keuangan APBD Kabupaten Langkat dalam pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase.

2. Penentuan isu isu strategis.

Dengan semakin meningkatnya kemajuan pembangunan dan juga pertumbuhan jumlah penduduk sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada bidang pangan dan sandang yang harus disiapkan guna memenuhi ketersediaan/kebutuhan masyarakat Langkat. Dari segi kelistrikan telah didirikan pembangunan PLTU di Kecamatan Pangkalan Susu, juga rencana Pembangunan Pabrik semen oleh PT. Indo Semen di Kecamatan Kutambaru Wilayah Langkat Hulu.

Untuk mendukung kegiatan seperti tersebut diatas perlu didukung dengan peningkatan Infrastruktur jalan baik jalan pedesaan maupun jalan Kabupaten yang berada di wilayah Langkat Hulu dan teluk Aru.

Dibidang Pertanian Kabupaten Langkat, program Ketahanan Pangan harus ditingkatkan untuk ketersediaan kebutuhan masyarakat

Upaya mendukung program Ketahanan pangan dimaksud telah diupayakan langkah – langkah antara lain :

- 2.1 Kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi agar pelayanan penyediaan air untuk petani optimal dapat tercukupi.
- 2.2 Kegiatan Rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi.
- 2.3 Kegiatan pembangunan Daerah irigasi baru, guna extensifikasi areal persawahan irigasi teknis dengan meningkatkan indeks Pertanian (IP) minimal 2 x setahun.
- 2.4 Adapun rencana areal Irigasi baru adalah :
 - Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Sei lepan.
 - Pembangunan Daerah Irigasi (DI) Sei Batang Serangan.
 - Pembangunan Jaringan Irigasi Sidorejo, Paya Salit, Gunung tinggi dan Sido Mukti Kec.Serapit.

3. Analisa Keterkaitan Lingkungan Strategis

Faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi diperoleh dari hasil analisis yang dilakukan terhadap lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan potensi sumber daya organisasi) dan eksternal organisasi (peluang dan ancaman yang dimiliki organisasi agar tetap bertahan dan eksis).

Analisis lingkungan internal mencakup analisis terhadap kekuatan dan kelemahan potensi sumber daya yang dimiliki organisasi, yang terdiri dari SDM, finansial, informasi, fasilitas perlengkapan dan sistem manajemen.

- SDM, ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan volume kerja yang ada relatif sudah memadai. Namun ditinjau dari aspek skill dan pengetahuan SDM di bidang teknik sipil relatif masih rendah.

- Finansial, dilihat dari rasio alokasi anggaran untuk pembangunan/rehabilitasi jalan, jembatan dan drainase dengan laju pertumbuhan kebutuhan
- Fasilitas perlengkapan, ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas fasilitas perlengkapan pendukung aktivitas organisasi relatif memadai.

Analisis lingkungan eksternal diarahkan untuk melihat peluang dan ancaman yang muncul dari luar lingkungan organisasi yang dapat mempengaruhi eksistensi Sosial, semakin besarnya tuntutan *good governance* serta semakin kritisnya masyarakat akan pelayanan prima dari aparat juga perlu menjadi perhatian. Meningkatnya permasalahan sosial sebagai dampak permasalahan banjir, mendorong masyarakat semakin kritis dan mendorong timbulnya tuntutan yang tinggi terhadap pembangunan/rehabilitasi jalan, jembatan dan drainase sedangkan kemampuan anggaran pembangunan masih terbatas. Disamping itu masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang mengatur tentang pemanfaatan badan jalan dan jaringan drainase seperti mendirikan bangunan di atas badan jalan dari di atas.

4. Analisa Isu Strategis

Kondisi atau sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan jaringan jalan dan jembatan dan irigasi antara lain adalah meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan fisik jalan dan jembatan dan irigasi. Kemudian terselenggaranya inventarisasi jalan dan jembatan seperti yang diharapkan. Selanjutnya kualitas dan kuantitas prasarana fisik jalan dan jembatan juga meningkat seiring dengan upaya meningkatkan potensi pembiayaan. Dan akhirnya juga diharapkan meningkatnya peran serta masyarakat serta kerjasama dengan instansi terkait maupun dengan pihak swasta dalam proses pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta irigasi.

Sementara itu kondisi atau sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan tersebut antara lain adalah meningkatnya kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Kemudian kualitas dan kuantitas data base dan perencanaan sistem jaringan jalan, jembatan, saluran drainase dan irigasi juga meningkat. Selanjutnya meningkatnya keterpaduan dan kerjasama pembiayaan pembangunan dimaksud juga kembali diharapkan meningkatnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan, jembatan, Irigasi dan saluran drainase.

BAB – IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum.

1.1. Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Secara Umum visi adalah pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan dan secara potensial untuk terwujud. Visi ditetapkan sebagai gambaran bersama mengenai masa depan dan menjadi komitmen murni seluruh masyarakat dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat. Tujuan penetapan Visi adalah untuk mencerminkan apa yang ingin dicapai, memberikan arah dan fokus strategis yang menjadi perekat dan menyatukan gagasan yang strategis, melalui orientasi terhadap masa depan, mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi dan mampu menjamin keseimbangan organisasi.

Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat yang telah dirumuskan dan ditetapkan adalah :

” Terwujudnya Infrastruktur yang memadai, terpadu dan berwawasan lingkungan ”

Adapun makna kata – kata yang terdapat pada visi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Memadai yaitu :

- bila pembangunan infrastruktur dapat menyentuh dan memenuhi akan kebutuhan masyarakat.
- Bila pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan tepat sasaran yaitu dapat memajukan perekonomian rakyat.

b. Terpadu yaitu :

- Terpadu antara kebutuhan masyarakat atas infrastruktur jalan desa, jalan Kabupaten dan Jalan Provinsi sehingga dapat melancarkan arus transportasi dan perekonomian rakyat.

c. Berwawasan lingkungan

- Pembangunan prasarana selalu berorientasi pada objek/situasi lingkungan sekitarnya.
- Masyarakat dapat menjaga hasil – hasil pembangunan infrastruktur dengan menjaga kelestarian lingkungan dalam gerak kehidupan sehingga tercipta suatu hubungan timbal balik yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia, alam dan lingkungannya.

1.2 Misi Dinas Pekerjaan Umum

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Adapun misi Dinas Pekerjaan Umum yang telah dirumuskan adalah :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang Profesional.
- b. Mewujudkan pembangunan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat banyak.
- c. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terpadu dan selaras.

2. Tujuan dan Sasaran.

2.1 Tujuan.

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5(Lima) tahun kedepan.

Dalam pencapaian visi dan misi, maka Tujuan Dinas Pekerjaan Umum adalah

- a. Meningkatkan kompetensi SDM Aparatur dibidang tugasnya.
- b. Meningkatkan pembangunan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
- c. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dengan perencanaan yang jelas dan terarah.

Tabel. 4.1
Misi – Tujuan

Misi	Tujuan
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia, Aparatur yang Profesional.	1. Meningkatkan kompetensi Sdm Aparatur dibidang tugasnya.
2. Mewujudkan pembangunan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat banyak.	1. Meningkatkan pembangunan sesuai dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat.
3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, terpadu dan selaras.	1. Meningkatkan kualitas pembangunan indrastruktur dengan perencanaan yang jelas dan terarah.

2.2 Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran atau bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan alokasi, distribusi dan pemanfaatan Sumber daya yang mengarah pada hasil nyata.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat menetapkan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya SDM Aparatur yang Profesional.
- b. Terlaksananya pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- c. Terlaksananya pembangunan yang terpadu dan selaras.

- b. Penataan dan pembentukan wilayah kota Kecamatan dan Kelurahan serta desa menjadi daerah pertumbuhan ekonomi sehingga dengan ditatanya satu wilayah pertumbuhan akan mampu mendorong segala sector pembangunan di perkotaan.

Kebijakan umum pembangunan diarahkan kepada pembangunan, peningkatan dan perawatan/pemeliharaan jalan dan jembatan, peningkatan dan perawatan/pemeliharaan perumahan/pemukiman serta peningkatan dan perawatan/pemeliharaan pengairan dan pengembangan perkotaan.

Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dalam mendukung strategi pelaksanaannya dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan pada kemampuan melaksanakan pelayanan masyarakat dengan melibatkan aparat, menggali potensi daerah dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Langkat.

Kebijakan yang akan ditetapkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat dalam rangka mempercepat proses mewujudkan visi dan misinya maka dilakukan sebagai berikut :

- Memberi kesempatan kepada Aparatur untuk mengikuti pelaksanaan Bintek ataupun Diklat atau mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- Mengupayakan alokasi dana untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan.
- Memberikan pembinaan kepada setiap unsur pelaksana kegiatan baik internal instansi maupun pelaksana kegiatan dilapangan.

BAB – V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- A. Program Kerja merupakan strategi langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategi nasional dan global. Program Kerja Strategi tidak terlepas dari kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program strategis hendaknya telah membahas mengenai masalah yang diperkirakan akan timbul diwaktu yang akan datang dan mungkin dapat berubah – ubah. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Program Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat sebagai kewenangannya yang berkesinambungan ditetapkan meliputi :

- a. Program Pembangunan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perumahan/pemukiman serta Gedung Pemerintah.
- b. Program Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan dan Jembatan.
- c. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran.

Program tersebut didukung dengan berbagai kegiatan (aktivitas) yang merupakan penjabaran dari program kerja yang strategis yang telah dirumuskan oleh organisasi tersebut.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program diatas, maka ditetapkan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran.

Program ini diperuntukkan bagi kelancaran administrasi Kantor, dimana Tahun 2014 dianggarkan biaya sebesar Rp. 1.790.300.000,--

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program ini didukung dengan kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor, Pembangunan Rumah dinas, Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor, Rehabilitasi/pemeliharaan Gedung/Peralatan serta perencanaan Pembangunan dan pemeliharaan sebanyak 20 Paket dan pada Tahun 2014 tertampung Anggaran dana pada Program ini sebesar Rp. 12.870.626.000,-

3. Program peningkatan Disiplin aparatur

Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin aparatur pegawai dimana Tahun 2014 dianggarkan dana sebesar rp. 50.000.000,- untuk pembelian Pakaian Khusus hari – hari tertentu.

4. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program ini meliputi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dimana pada tahun 2014, dianggarkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- dan akan dilatih tenaga teknis sebanyak 42 Orang .
5. Program Pembangunan jalan dan Jembatan.
Program ini meliputi kegiatan : Perencanaan Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan jalan dan jembatan, dimana Pada Tahun 2014 Program ini dilaksanakan sebanyak 322 Paket dengan Anggaran Biaya sebesar Rp. 165.273.753.787,- dengan panjang jalan 288.023 M.
6. Program Pembangunan Saluran Drainage/Gorong -- gorong
Program ini meliputi kegiatan : Perencanaan Pembangunan Saluran Drainage/Gorong – gorong, Pembangunan Saluran berupa Parit beton. Pada Tahun 2014 dianggarkan Dana untuk Program ini sebesar Rp. 15.392.000.000,- diperuntukkan untuk Pembangunan Drainage/gorong – gorong sebanyak 58 Paket.
7. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong.
Program ini meliputi kegiatan : Pembangunan Bronjong/ tembok penahan untuk pengaman jalan ataupun sarana lainnya.Pada Tahun 2014 Program ini dianggarkan dengan sebesar Rp. 10.101.000.000,- sebanyak 19 Paket kegiatan.
8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan jembatan.
Program ini meliputi kegiatan : Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan jembatan, Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pada Tahun 2014 Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 27.666.272.000,- sebanyak 48 Paket kegiatan.
9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya.
Program ini meliputi kegiatan : Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, Pelaksanaan Normalisasi saluran, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan irigasi, Rehabilitasi/pemeliharaan Pintu air, Optimalisasi fungsi Jaringan Irigasi. Pada Tahun 2014 Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 16.973.352.893,- sebanyak 58 paket kegiatan.
10. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Program ini meliputi kegiatan : Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa, Pembangunan sarana air bersih/Sumur – sumur air tanah. Pada Tahun 2014 Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 5.311.429.000,-- sebanyak 22 Unit.
11. Program Pengendalian banjir.
Program ini meliputi kegiatan : Peninggian / pembangunan tanggul untuk mencegah bahaya banjir. Pada Tahun 2014 Program ini dianggarkan dana sebesar Rp. 17.325.000.000,--dengan 7 Paket kegiatan.
12. Program Pembangunan Infrastruktur pedesaan.
Program ini meliputi kegiatan : Pembangunan MCK serta pemeliharaan/rehabilitasi jalan dan jembatan di pedesaan. Pada akhir Tahun 2014 pada Program dianggarkan dana sebesar Rp. 1.518.000.000,- dengan target panjang jalan yang teraspal sepanjang 190 M , jalan desa yang dikeraskan sepanjang 3,7 Km dan pembangunan MCK sebanyak 9 Unit.

B. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif.

Indikator Kinerja merupakan ukuran keberhasilan pencapaian suatu kegiatan, sasaran atau tujuan Strategik atau bahkan Visi Organisasi. Penentuan Indikator kinerja dan kelompok sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Langkat dirinci pada setiap Program dan Kegiatan yang direncanakan yang dituangkan pada Strategi Pembangunan Kabupaten Langkat yaitu :

- Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya air.
- Peningkatan panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik
- Peningkatan Infrastruktur pemukiman.

Indikator sasaran pada Strategi diatas telah ditetapkan pada Peningkatan Sumber Daya air dan Jalan yang dirumuskan pada **(Lampiran 1)**

INDIKATOR KINERJA SASARAN

Lampiran .I
Dinas Pekerjaan Umum

NO.	INDIKATOR SASARAN	RUMUS	PERHITUNGAN	CAPAIAN KINERJA	
				2012	2013
1	Jumlah luasan sawah beririgasi (Ha)	Jumlah seluruh luasan sawah beririgasi di Kab. Langkat	-	5.182 Ha	5.182 Ha
2	Prosentase luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	Jumlah luas irigasi dalam kondisi baik ----- x 100 % Jumlah seluruh luas irigasi yang ada di Kab. Langkat	----- x 100	47,56 %	87,58 %
3	Prosentase panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ----- x 100 % Panjang seluruh jalan kabupaten	----- x 100	52,84 %	65,75 %
4	Jalan di Kab. Langkat	Panjang jalan yang dibangun di Kab. Langkat	-	226.100 M	256.671 M
5	Panjang jalan Desa yang tertangani	Panjang jalan Desa yang tertangani	-	123.480 M	37.730 M
6	Drainase dalam kondisi baik	Panjang drainase tersumbat/pembuangan aliran air (M) ----- x 100 % Panjang seluruh seluruh drainase kabupaten (M)	----- x 100	1,19 %	0,77 %
7	Prosentase Jembatan dalam kondisi baik	Jumlah jembatan dalam kondisi baik ----- x 100 % Jumlah jembatan yang ada di Kab. Langkat	----- x 100	58 %	55,95 %
8	Air Bersih	Jumlah sarana air bersih yang dibangun	-	28 unit	16 unit
9	Pembangunan turap/talud/bronjong di daerah rawan longsor/Abrasi	Jumlah lokasi pembangunan turap/talud/bronjong ----- x 100 % Jumlah seluruh wilayah rawan longsor/Abraai	----- x 100	2.137 M	3.026 M